

ANALISIS BIROKRASI PROGRAM MSIB BATCH 7: KOORDINASI DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA

Cikal Adelaide Budaya¹, Mohammad Noufal Atthar², Muhammad Prakoso Aji³

¹²³Politics Department, Faculty of Social and Political Science,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210413114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413072@mahasiswa.upnvj.ac.id,
prakosoaji@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika birokrasi dalam pelaksanaan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 7 tahun 2024 yang menjadi bagian dari kebijakan Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek. Latar belakang studi ini bertumpu pada fenomena keterlambatan pengumuman seleksi program, yang memicu keresahan mahasiswa dan menimbulkan kritik terhadap lemahnya komunikasi antar lembaga. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa struktur birokrasi dalam MSIB tidak bersifat netral dan hierarkis secara kaku, menjadi arena interaksi kekuasaan yang melibatkan Kemendikbudristek, perguruan tinggi, mitra industri, dan mahasiswa. Ketidakefisienan dalam koordinasi serta ketergantungan pada tekanan publik menegaskan bahwa birokrasi pendidikan dalam konteks ini cenderung reaktif dan kurang transparan. Temuan ini diperkuat dengan teori birokrasi politik yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan administrasi teknis, melainkan juga berperan dalam negosiasi kekuasaan antar aktor. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa reformasi komunikasi dan struktur koordinasi yang lebih inklusif dan adaptif, pelaksanaan MSIB berisiko mengurangi kepercayaan publik serta keberlanjutan program pendidikan strategis nasional.

Kata Kunci: MSIB Batch 7, Birokrasi, Mahasiswa, Kemendikbudristek, Mitra

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of bureaucracy in the implementation of the Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 7 program in 2024, which is part of the Kampus Merdeka policy by the Ministry of Education, Culture, Research, and

Technology (Kemendikbudristek). The background of this study focuses on the phenomenon of delayed program selection announcements, which caused student unrest and led to criticism of the weak communication between institutions. Using a qualitative approach based on literature studies, this research finds that the bureaucratic structure in MSIB is not neutral and rigidly hierarchical, but rather becomes an arena of power interaction involving Kemendikbudristek, higher education institutions, industry partners, and students. Inefficiency in coordination and dependence on public pressure highlight that educational bureaucracy in this context tends to be reactive and lacks transparency. This finding is supported by the political bureaucracy theory, which shows that bureaucracy does not only carry out technical administration but also plays a role in power negotiations between actors. The study concludes that without reforms in communication and a more inclusive and adaptive coordination structure, the implementation of MSIB risks diminishing public trust and the sustainability of this national strategic education program.

Keywords: MSIB Batch 7, Bureaucracy, Students, Kemendikbudristek, Partners

Pendahuluan

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah satu program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Program ini dirasa merupakan sebuah jawaban bagi para pelajar, khususnya mahasiswa dalam menghadapi era baru yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama maksimal tiga semester, dengan harapan dapat mencetak lulusan yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadapi tantangan global (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Selaras dengan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia periode 2019-2024, Nadiem Makarim, menekankan bahwa tujuan dari program ini yakni agar mahasiswa dapat merasakan simulasi dunia kerja (Aprilia, D., A., & Satriani, A., I., 2025). Kebijakan Kampus Merdeka berlandaskan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18, di mana disebutkan bahwa beban belajar mahasiswa dapat ditempuh melalui pembelajaran di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi. Kebijakan

ini juga mengacu pada berbagai regulasi pendidikan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selain memberikan keuntungan bagi mahasiswa, program ini juga menguntungkan mitra industri karena menyediakan akses terhadap calon talenta yang dapat direkrut secara langsung. Interaksi erat antara dunia akademik dan dunia kerja ini juga memungkinkan terjadinya pembaharuan kurikulum perguruan tinggi agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Program MSIB sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka melibatkan berbagai aktor dalam pelaksanaannya, di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai penyelenggara program, perguruan tinggi sebagai institusi akademik yang memfasilitasi mahasiswa, mitra industri sebagai penyedia tempat magang atau proyek independen, serta mahasiswa sebagai peserta program. Interaksi antar-aktor ini menuntut adanya sistem birokrasi yang terstruktur, responsif, dan efisien untuk menjamin kelancaran proses dari tahap pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Istilah birokrasi merujuk pada suatu sistem pengelolaan atau administrasi yang ditandai dengan ciri-ciri khusus, seperti pendekatan yang rasional, hubungan kerja yang tidak bersifat personal, adanya susunan hierarkis yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang terstruktur.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara mendalam oleh Max Weber pada abad ke-20, di mana ia merumuskan sejumlah prinsip yang dapat digunakan untuk memahami cara kerja organisasi formal, baik di lingkungan pemerintahan, perusahaan, maupun institusi lainnya (Ali., M., et al., 2023). Dalam pelaksanaan Program MSIB yang melibatkan banyak aktor, keberadaan birokrasi yang terorganisir menjadi hal penting dalam menjaga kelancaran dan efektivitas program. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, koordinasi antara Kemendikbudristek, perguruan tinggi, mitra industri, dan mahasiswa dapat berjalan lebih sistematis dan minim hambatan.

Tantangan koordinasi birokrasi dalam pelaksanaan MSIB Batch 7 terletak pada kompleksitas struktur pengelolaan program yang melibatkan empat pihak utama: Ditjen

Diktiristek, Tim Pelaksana MSIB, perguruan tinggi, dan mitra industri. Proses komunikasi antar pihak seringkali mengalami keterlambatan dan ketidakselarasan yang menghambat kelancaran administrasi, mulai dari tahap pendaftaran hingga evaluasi program. Kendala sinkronisasi ini berdampak pada penyesuaian timeline pelaksanaan yang kerap berubah, yang kemudian memengaruhi kejelasan persyaratan dan pengurangan kuota mahasiswa karena seleksi yang semakin ketat akibat beban prosedur administratif. Bukti dari media sosial, menggambarkan keluhan nyata dari peserta yang merasa proses koordinasi berjalan tidak efektif.

Selain itu, terdapat pula laporan mengenai pengunduran diri mitra industri yang disebabkan oleh faktor internal dan ketidaksesuaian ekspektasi antara pihak mitra dengan penyelenggara program. Keseluruhan isu ini menegaskan perlunya perbaikan sistem birokrasi yang lebih terstruktur, responsif, dan transparan guna menjamin implementasi MSIB yang optimal dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan program. Hambatan birokrasi dan lemahnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan program MSIB. Ketidaktepatan dalam penjadwalan dan prosedur administrasi yang berbelit tidak hanya mengganggu efektivitas pembelajaran, dimana mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang terpadu dan terstruktur secara optimal, tetapi juga menurunkan tingkat kepuasan peserta karena munculnya ketidakpastian dan keterlambatan informasi.

Lebih lanjut, kondisi ini dapat merusak kepercayaan mitra industri terhadap program, karena mitra industri merasa bahwa ketidakselarasan koordinasi berdampak langsung pada profesionalisme dan konsistensi pelaksanaan program. Dengan demikian, hambatan birokrasi yang belum ditangani secara efektif tidak hanya menghambat proses pembelajaran yang bersifat kontekstual dan langsung di lapangan, tetapi juga berpotensi mengurangi minat serta partisipasi mitra industri dalam berkolaborasi, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan dan mutu program MSIB secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana koordinasi dan sistem birokrasi mempengaruhi pelaksanaan MSIB Batch 7. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul yang berpotensi mengganggu efektivitas pembelajaran,

kepuasan peserta, dan kepercayaan mitra industri. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang strategis untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan sistem birokrasi ke depan, sehingga pelaksanaan MSIB dapat berjalan secara optimal dan memenuhi standar mutu yang diharapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka, di mana data yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang telah terjadi di masa lalu dan sebelumnya dilakukan analisis dan telah dikaji oleh peneliti lain (Yusuf & Khasanah, 2019). Metode kualitatif memiliki sifat yang mendalam dan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan makna di balik fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkapkan realitas sosial yang terjadi dengan cara yang lebih holistik, tanpa mengandalkan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Moleong, 2005).

Sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dokumen dan arsip yang ada, baik berupa teks maupun narasi yang tercatat dalam berbagai sumber terpercaya. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif (Sugiyono, 2016). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dimulai dengan mencari jurnal-jurnal yang relevan dan terpercaya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari jurnal-jurnal tersebut. Terakhir, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan. Metode penelitian ini mengandalkan sumber data yang telah ada dan melibatkan serangkaian langkah analisis untuk memproses data yang sesuai dengan kasus yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan Struktur birokrasi MSIB

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program MSIB dalam kerangka Kampus Merdeka dapat dipahami sebagai suatu arena kompleks yang mempertemukan beragam aktor dan kepentingan dalam sistem yang tidak sepenuhnya linier dan hierarkis. Dalam perspektif birokrasi politik sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters (2001),

birokrasi bukan sekadar pelaksana netral dari kebijakan publik, melainkan merupakan entitas yang terlibat dalam dinamika kekuasaan, negosiasi, serta interaksi antar institusi yang penuh dengan ketidakseimbangan kepentingan. Hal ini sangat relevan dalam menelaah bagaimana struktur pelaksanaan MSIB terbentuk, bekerja, dan menghadapi tantangan dalam realitas implementasi.

Program MSIB dikelola melalui suatu struktur yang bertingkat, mulai dari Kemendikbudristek sebagai pusat pengambilan kebijakan, hingga kepada pihak perguruan tinggi dan mitra industri sebagai pelaksana di lapangan. Di tingkat pusat, aktor utama adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), yang bertanggung jawab atas perumusan arah kebijakan. Melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), berbagai pedoman teknis disusun, termasuk regulasi pelaksanaan program magang dan mekanisme pelaporannya. Tim Pelaksana MSIB yang dibentuk secara khusus mengoperasikan platform digital, menangani proses seleksi peserta dan mitra, serta memfasilitasi sistem monitoring dan evaluasi.

Namun, dalam konteks birokrasi politik, hubungan antara kementerian dengan aktor pelaksana di bawahnya bukanlah relasi komando yang bersifat satu arah. Sejalan dengan pandangan Peters (2001), birokrasi kerap kali membentuk jaringan relasi yang bersifat politis di mana terjadi persaingan, konflik kepentingan, dan perebutan pengaruh antar institusi. Dalam hal ini, Tim MSIB tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai agen penghubung yang sering kali harus melakukan interpretasi kebijakan pusat dalam konteks realitas di lapangan, termasuk dalam menghadapi dinamika di tingkat perguruan tinggi maupun mitra industri.

Di lingkungan perguruan tinggi, struktur pelaksana MSIB umumnya melibatkan Wakil Rektor Akademik, Koordinator MBKM, dan dosen pembimbing akademik. Peran perguruan tinggi sangat krusial dalam mengintegrasikan kegiatan magang ke dalam sistem akademik formal, termasuk dalam hal pengakuan SKS, penjaminan mutu kegiatan, serta pendampingan mahasiswa. Akan tetapi, tidak semua perguruan tinggi memiliki struktur kelembagaan MBKM yang mapan. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak jarang proses pelaksanaan program menjadi bergantung pada keputusan informal atau inisiatif

personal aktor-aktor tertentu di perguruan tinggi. Peters (2001) menekankan bahwa dalam sistem birokrasi politik, keputusan administratif tidak selalu bersumber dari instruksi formal, tetapi sering kali lahir dari hasil kompromi antara kepentingan struktural dan aktor individu yang memiliki akses kekuasaan tertentu. Fenomena dalam pelaksanaan MSIB, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kesiapan struktural di perguruan tinggi, misalnya terkait perbedaan dalam penafsiran atas kriteria pembimbing, penentuan konversi nilai, dan persyaratan akademik lainnya kerap memicu terjadinya disorientasi pelaksanaan yang berulang dari satu batch ke batch berikutnya.

Sementara itu, posisi mitra industri dalam birokrasi program MSIB merupakan entitas yang paling mencerminkan prinsip dasar dari teori birokrasi politik. Peters (2001) mencatat bahwa birokrasi tidak hanya menjadi subjek dari pengaruh politik, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun aliansi, meredakan konflik, atau bahkan mempertahankan status quo kekuasaan. Mitra industri dalam konteks MSIB memiliki status sebagai aktor non-pemerintah yang relatif otonom, namun diikat oleh regulasi dan platform administratif dari pemerintah. Hubungan yang terbentuk bukan sekadar hubungan administratif semata, melainkan hubungan yang diwarnai ketegangan antara kemandirian lembaga dengan tuntutan birokrasi pemerintah pusat.

Sebagaimana dikemukakan Peters (2001), organisasi otonom sering merasa bahwa peran organisasi dalam pelaksanaan kebijakan hanya diletakkan di luar ruang dialog dan tawar-menawar. Hal ini terlihat ketika mitra industri diharuskan untuk mengikuti sistem pelaporan yang kompleks, menyusun kurikulum sesuai standar pusat, serta melibatkan diri dalam proses evaluasi yang kadang tidak memperhitungkan kondisi internal. Akibatnya, tidak sedikit mitra yang mengundurkan diri atau mengalami hambatan dalam pelaksanaan program karena tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem birokrasi digital yang ditetapkan.

Kondisi ini menegaskan bahwa dalam sistem birokrasi politik, relasi antara negara dan aktor non-negara sering kali timpang, di mana kapasitas adaptasi menjadi faktor yang menentukan sejauh mana suatu organisasi mampu bertahan dalam sistem yang dikendalikan oleh struktur pusat. Peters (2001) menyebut bahwa birokrasi modern tidak

netral secara politik, melainkan sarat dengan kepentingan strategis yang berkaitan dengan legitimasi kebijakan, kontrol informasi, serta pemeliharaan hubungan kekuasaan. Mahasiswa sebagai subjek dari kebijakan ini, menjadi pihak yang paling terdampak oleh tarik menarik struktur birokrasi yang demikian kompleks. Mahasiswa tidak hanya menjalani peran sebagai peserta magang, melainkan juga harus mengelola beban administratif, komunikasi lintas institusi, dan menavigasi ekspektasi dari dua institusi yang berbeda: perguruan tinggi dan mitra industri. Dalam pandangan Peters, situasi ini memperlihatkan bagaimana birokrasi kerap kali membebani pihak yang paling lemah dalam sistem dengan ekspektasi dan regulasi, tanpa memberikan ruang partisipasi sejati dalam proses formulasi kebijakan.

Dengan demikian, struktur birokrasi MSIB dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari dinamika birokrasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Guy Peters. Kompleksitas aktor, relasi kekuasaan, keterbatasan adaptasi, serta minimnya ruang negosiasi dalam pengambilan kebijakan memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketepatan desain teknis, melainkan juga pada kemampuan institusi untuk membangun mekanisme dialog, kompromi, dan distribusi kewenangan secara adil. Tanpa itu, program yang secara ideologis bertujuan memerdekakan mahasiswa akan menjadi beban administratif yang mereproduksi ketimpangan kekuasaan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Di tengah dinamika hubungan antar pihak dalam pelaksanaan program MSIB, peran perguruan tinggi sebagai fasilitator dalam implementasi program magang juga sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Dalam konteks ini, perguruan tinggi bertindak sebagai perantara antara kebijakan pusat dan pelaksana di lapangan, namun juga menghadapi kendala dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Guy Peters (2001), birokrasi tidak hanya menjadi agen pelaksana kebijakan, tetapi juga tempat terjadinya "political bargaining" atau tawar-menawar politik yang terjadi di antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam hal ini, pihak perguruan tinggi sering kali berada dalam posisi yang "terjepit" antara kewajiban untuk memenuhi standar kebijakan pemerintah pusat dengan keterbatasan sumber daya internal.

Selain itu, sebagai bagian dari struktur birokrasi politik, perguruan tinggi seringkali terjebak dalam dilema antara efisiensi administratif dan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan spesifik mahasiswa dan mitra industri. Sistem birokrasi yang terlalu kaku atau terlalu formal dapat memperlambat proses, menciptakan jarak komunikasi, serta menambah beban administratif bagi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Dalam hal ini, Guy Peters (2001) mengingatkan bahwa birokrasi tidak selalu berarti pengaturan yang efisien; dalam banyak kasus, ia dapat memperburuk hambatan komunikasi dan membuat jalur pelaporan menjadi terhambat oleh prosedur yang berlebihan. Pendekatan birokrasi politik menyoroti bagaimana hierarki dan prosedur administratif yang kompleks dapat menghalangi tercapainya tujuan yang lebih besar dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Tantangan birokrasi yang dihadapi oleh mitra industri juga memperlihatkan bagaimana birokrasi politik berperan dalam menentukan sejauh mana kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan sukses. Dalam hal ini, hubungan antara Kemendikbudristek dan mitra industri mencerminkan bagaimana birokrasi dapat melibatkan "bargaining" atau negosiasi, di mana mitra industri yang pada dasarnya merupakan aktor otonom berusaha beradaptasi dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai organisasi otonom, mitra industri sering merasa terpinggirkan dalam ruang dialog yang terbatas, di mana mitra industri terpaksa mengikuti prosedur yang ditetapkan tanpa adanya ruang untuk tawar-menawar atau penyesuaian berdasarkan konteks yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan konsep birokrasi politik yang dikemukakan oleh Peters (2001), bahwa dalam banyak situasi, aktor-aktor otonom merasa kebijakan pemerintah tidak memberikan ruang untuk perubahan atau kompromi, sehingga menambah beban dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sementara itu, mahasiswa sebagai subjek utama dalam program magang juga merasakan dampak dari struktur birokrasi yang ada. Mahasiswa harus menjalani berbagai prosedur administratif yang cenderung memberatkan, dari pendaftaran, seleksi, hingga pelaporan aktivitas magang. Dalam hal ini, teori birokrasi politik berperan dalam menjelaskan bagaimana birokrasi pendidikan tidak hanya mengatur pelaksanaan teknis program, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam hubungan antara aktor pelaksana

dan pihak yang terlibat dalam kebijakan. Mahasiswa sering kali merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau mengajukan kritik konstruktif terhadap prosedur yang ada. Dalam kerangka birokrasi politik, hal ini mencerminkan bagaimana *"top-down" control*, yang menjadi ciri khas birokrasi publik, berpotensi mengurangi otonomi individu dalam merespons perubahan atau tantangan yang ada di lapangan.

Guy Peters (2001) mengemukakan bahwa birokrasi dalam konteks negara-negara demokratis cenderung memperburuk perbedaan antara pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks MSIB, Kemendikbudristek sebagai perumus kebijakan dan kontrol pelaksanaan, sering kali memunculkan ketidakselarasan dengan kebutuhan praktis di tingkat perguruan tinggi dan mitra industri. Keterbatasan sistem komunikasi dan kurangnya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai bagaimana program seharusnya dijalankan. Dengan kata lain, birokrasi dalam implementasi MSIB juga mencerminkan ketidakmampuan untuk mengakomodasi realitas yang beragam dari aktor-aktor di lapangan, yang mengarah pada kegagalan dalam mencapai efisiensi operasional dan dampak yang optimal.

Selain itu, sistem pelaporan berbasis platform digital yang diterapkan dalam MSIB sering kali menjadi kendala tambahan bagi perguruan tinggi dan mitra industri. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan sistem dengan kapasitas teknologi yang dimiliki masing-masing pihak menciptakan friksi dalam proses komunikasi. Dalam kerangka birokrasi politik, fenomena ini menunjukkan bagaimana birokrasi teknologi, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, seringkali memperburuk ketidaksetaraan antara aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang kurang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Pentingnya mengintegrasikan teori birokrasi politik dalam pembahasan ini terletak pada pemahaman bahwa birokrasi bukanlah struktur yang statis dan terisolasi. Sebaliknya, birokrasi dalam sistem pendidikan tinggi seperti program MSIB, berfungsi sebagai medan pertempuran bagi aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Peters (2001), dalam birokrasi politik, sering kali ada

ketidaksesuaian antara tujuan formal organisasi dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam konteks pelaksanaan program magang MSIB yang mengharuskan adanya koordinasi antar berbagai aktor yang sangat bergantung pada tingkat komunikasi, koordinasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan struktur birokrasi yang ada.

Implementasi program MSIB dalam struktur birokrasi pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan bagaimana birokrasi politik berperan tidak hanya dalam mengatur dan mengontrol, tetapi juga menciptakan ketegangan dan dinamika dalam hubungan antar aktor yang terlibat. Dalam sistem birokrasi yang kompleks ini, peran negosiasi, kompromi, dan fleksibilitas menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, memahami birokrasi sebagai arena politik yang penuh dengan dinamika kekuasaan adalah langkah penting untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam mengelola program seperti MSIB di masa depan.

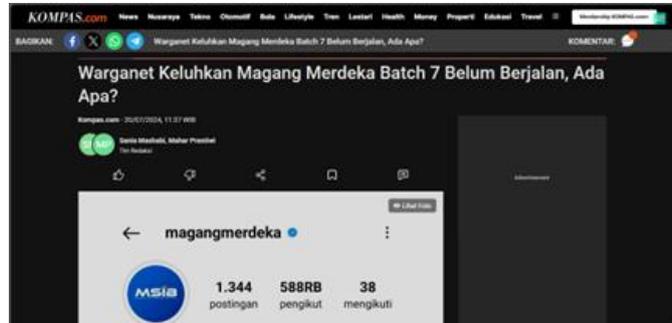
Proses koordinasi antara pihak terkait

Salah satu tantangan paling mencolok dalam pelaksanaan Program MSIB Batch 7 adalah lambatnya proses koordinasi antara berbagai aktor birokrasi yang terlibat, mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Tim Pelaksana MSIB, perguruan tinggi, hingga mitra industri. Meskipun secara struktural sudah ada alur koordinasi yang dirancang agar program ini berjalan terintegrasi, dalam praktiknya banyak pihak yang mengalami kebingungan dan ketidakpastian karena tidak adanya informasi resmi yang disampaikan secara cepat dan seragam dari tingkat pusat. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan yang muncul, baik dari mahasiswa maupun mitra industri, mengenai ketidakjelasan tahapan seleksi dan offering yang seharusnya sudah berjalan setelah tahap administrasi ditutup pada 12 Juni 2024. Namun hingga pertengahan Juli, atau lebih dari satu bulan setelah tenggat waktu tersebut, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Keterlambatan ini memicu gelombang kekecewaan yang besar dari mahasiswa yang telah menaruh harapan tinggi terhadap

program ini, terutama karena MSIB menawarkan keuntungan seperti konversi 20 SKS dan Biaya Bantuan Hidup (BBH) bagi pesertanya.

Kondisi ini diberitakan secara luas oleh media lokal, salah satunya oleh Magelang Ekspres, yang mencatat bahwa ribuan mahasiswa menyerbu kolom komentar akun Instagram @magangmerdeka sebagai bentuk protes atas tidak adanya kejelasan jadwal. Bahkan tidak hanya mahasiswa, perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pun menyatakan belum mendapat arahan resmi dari penyelenggara. Situasi ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi antar level birokrasi, khususnya antara pemerintah pusat dengan mitra dan institusi pendidikan, mengalami hambatan serius (Magelang Ekspres, 2024).

Media besar seperti Kompas.com pun turut mengangkat keresahan ini dengan menyebut bahwa program Magang Merdeka di bawah Kemendikbud Ristek kini menjadi perhatian utama warganet, khususnya di tengah mahasiswa. Beberapa komentar bahkan menyuarakan kekecewaan mendalam akibat tidak adanya kejelasan mengenai timeline dan kepastian penempatan. Salah satu akun, @njw_ptri, menyampaikan kritik keras dengan menyebut bahwa mahasiswa merasa dirugikan secara langsung karena program ini tidak memiliki kepastian jadwal. Ia juga menyinggung bahwa sebagai program di bawah naungan kementerian, sudah semestinya pelaksanaannya mencerminkan profesionalisme dan transparansi. Keluhan senada juga muncul dari akun lain seperti @woreshitment dan @kielaislost, yang mendesak agar proses seleksi dan penempatan MSIB Batch 7 segera dilakukan (Kompas.com, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi mahasiswa terhadap program MSIB sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang memadai dari penyelenggara. Ketika informasi yang seharusnya bersifat koordinatif dan informatif diabaikan, maka kredibilitas program nasional seperti MSIB pun ikut dipertaruhkan.



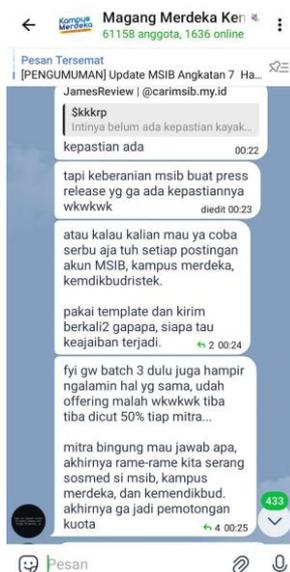
Gambar 1 Berita Mengenai Keluhan Mahasiswa terhadap MSIB Batch 7
(Sumber: Kompas)



Gambar 2 Berita Mengenai Keluhan Mahasiswa terhadap MSIB Batch 7
(Sumber: Magelang Ekspres)

Di sisi lain, percakapan di komunitas internal peserta MSIB seperti grup Telegram “Magang Merdeka Kemendikbud” juga memperkuat kesimpulan tersebut. Salah satu peserta dengan terang-terangan menyatakan bahwa pengalaman keterlambatan dan ketidakpastian informasi sudah pernah terjadi sejak Batch 3. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, disebutkan bahwa untuk mendapatkan kejelasan, para peserta bahkan harus melakukan “serangan sosial media” terhadap akun MSIB, Kampus Merdeka, dan Kemdikbud seolah tekanan publik menjadi satu-satunya cara agar kementerian merespons keluhan secara terbuka. Dalam pesannya, ia menulis: “mitra bingung mau

jawab apa, akhirnya rame-rame kita serang sosmed si msib, kampus merdeka, dan kemendikbud. akhirnya ga jadi pemotongan kuota.”



Gambar 3 Grup Telegram “Magang Merdeka Kemendikbud”

(Sumber: X (<https://x.com/dinamikkkkkkk/status/1824945539756196018>))

Fenomena ini mencerminkan adanya pola koordinasi yang bersifat reaktif, bukan proaktif. Ketika saluran formal komunikasi birokrasi gagal memberikan respons yang cepat dan adaptif terhadap dinamika lapangan, mahasiswa sebagai penerima manfaat terpaksa mengandalkan tekanan publik untuk memperoleh kejelasan. Padahal, dalam kerangka tata kelola publik yang baik, transparansi dan komunikasi antarlembaga seharusnya menjadi fondasi dari keberhasilan implementasi kebijakan, bukan sesuatu yang hanya terjadi ketika sudah mendapat sorotan dari warganet. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan koordinasi yang tidak sinkron ini tidak hanya mengganggu jalannya program, tetapi juga secara langsung berdampak pada kepercayaan mahasiswa terhadap sistem birokrasi pendidikan tinggi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pola koordinasi internal dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti MSIB.

Menurut Solong dan Yadi (2021), birokrasi merupakan suatu mekanisme pengelolaan organisasi terutama dalam skala besar seperti lembaga pemerintahan atau korporasi yang dijalankan melalui seperangkat aturan, prosedur, serta struktur hierarki yang terorganisir. Ciri utama birokrasi mencakup penerapan logika rasional, pendekatan yang tidak bersifat personal, sistem hierarki yang tertata, serta pembagian kerja yang spesifik sesuai fungsi. Salah satu karakteristik utama birokrasi adalah pembagian kerja yang spesifik, di mana setiap individu dalam organisasi memiliki peran yang telah ditentukan. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, ada pejabat yang fokus pada urusan perpajakan sementara pejabat lainnya menangani proses perizinan. Pembagian tugas yang terstruktur seperti ini dapat mendorong terwujudnya spesialisasi dan meningkatkan efisiensi kerja (Devi, I., et al, 2023).

Meskipun program MSIB telah memiliki alur koordinasi yang dirancang secara struktural, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip birokrasi yang seharusnya menjamin efisiensi dan keteraturan. Teori menyebutkan bahwa birokrasi adalah mekanisme pengelolaan organisasi yang dijalankan melalui aturan, prosedur, dan hierarki yang tertata, serta pembagian kerja yang spesifik. Dalam kasus MSIB, yang seharusnya menjadi alat koordinasi yang efektif, struktur birokrasi menjadi sumber kebingungan dan keterlambatan. Tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, dan komunikasi antar-lembaga tampak berjalan secara tidak teratur.

Fenomena “serangan sosial media” yang dilakukan mahasiswa terhadap akun resmi MSIB dan Kemendikbud menunjukkan bahwa birokrasi dalam program ini bersifat reaktif, bukan proaktif. Ketika saluran formal komunikasi gagal berfungsi, tekanan publik menjadi satu-satunya cara agar kementerian merespons keluhan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola publik yang baik, di mana transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi antarlembaga seharusnya menjadi pondasi utama. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan masalah koordinasi teknis semata, tetapi juga memperlihatkan dampak serius terhadap kepercayaan mahasiswa sebagai penerima manfaat. Program strategis nasional seperti MSIB, yang seharusnya menjadi jembatan antara dunia

pendidikan dan dunia kerja, kehilangan kredibilitas akibat buruknya pelaksanaan birokrasi. Harapan mahasiswa akan konversi SKS dan dukungan biaya hidup berubah menjadi kekecewaan akibat minimnya kepastian dan profesionalisme. Kegagalan birokrasi bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi telah menjadi hambatan dalam menjawab harapan publik. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pola koordinasi dan manajemen informasi dalam pelaksanaan program-program nasional, agar semangat reformasi birokrasi tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan benar-benar diwujudkan dalam praktik yang responsif dan profesional.

Dampak Birokrasi terhadap Mahasiswa dan Mitra

Salah satu isu paling krusial dalam pelaksanaan Program MSIB Batch 7 adalah terjadinya kemunduran linimasa secara signifikan yang berdampak langsung terhadap kejelasan informasi, penempatan, serta kesiapan semua pihak yang terlibat. Fenomena ini bukan hanya permasalahan teknis semata, melainkan merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola birokrasi dalam lingkup program pendidikan tinggi strategis nasional. Dalam konteks teori birokrasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Peters (2001), ketidakefisienan birokrasi dapat terjadi bukan karena tidak adanya struktur, melainkan karena struktur tersebut dipenuhi oleh kepentingan politik dan ketidakseimbangan kekuasaan antarlembaga. Hal ini terlihat nyata dalam kasus MSIB Batch 7, di mana struktur birokrasi yang seharusnya menjamin keteraturan dan efisiensi menjadi penghambat utama bagi kelancaran program.



Gambar 4. Timeline MSIB 7

(Sumber: Detik.com (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7315753/cek-di-sini-jadwal-lengkap-pendaftaran-msib-batch-7>))

Kemunduran pengumuman dan seleksi MSIB Batch 7 yang sebelumnya dijadwalkan pada pertengahan Juni 2024, namun belum terlaksana hingga pertengahan Juli, menimbulkan keresahan di tengah mahasiswa. Ribuan mahasiswa menyampaikan keluhan secara terbuka di media sosial, menandakan adanya vacuum komunikasi antara Kemendikbudristek sebagai penyelenggara program dengan para peserta. Menurut laporan dari Kompas.com (2024), akun resmi @magangmerdeka dibanjiri komentar protes dari mahasiswa yang merasa dirugikan oleh tidak adanya kepastian jadwal dan arah komunikasi yang tidak jelas.

Dalam pernyataan resminya, Kemendikbudristek menyebut bahwa “penyesuaian linimasa ini dilakukan karena tengah proses pembukaan automatic adjustment terhadap anggaran belanja wajib bidang pendidikan oleh Kementerian Keuangan” (Kompas.com, 2024). Pernyataan ini telah memberikan penjelasan administratif atas keterlambatan tersebut, namun mempertegas ketergantungan birokrasi terhadap proses-proses

struktural yang tidak komunikatif dan kurang responsif terhadap kebutuhan publik. Keadaan ini menunjukkan bahwa komunikasi birokrasi yang seharusnya bersifat proaktif dan transparan bergeser menjadi reaktif, respon hanya muncul setelah tekanan publik meluas. Penjelasan resmi dikeluarkan setelah muncul desakan masif di ruang publik, yang menandakan lemahnya inisiatif komunikasi dari dalam birokrasi itu sendiri. Dalam konteks birokrasi politik, pola ini mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang, di mana birokrasi tidak mampu menjalankan fungsinya secara otonom dan akuntabel, namun bergantung pada tekanan eksternal untuk bergerak (Peters, 2001).

Mahasiswa yang seharusnya menjadi subjek utama dari program ini menjadi pihak yang paling terdampak oleh disfungsi birokrasi. Mahasiswa harus menunggu dalam ketidakpastian, mengandalkan rumor, grup Telegram, dan bahkan “serangan sosial media” sebagai satu-satunya cara untuk mendapat informasi resmi dari pihak penyelenggara. Dalam diskusi di komunitas Telegram “Magang Merdeka Kemendikbud”, beberapa peserta menyampaikan bahwa pengalaman keterlambatan ini bukan hal baru, bahkan telah terjadi sejak Batch 3. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang sama telah menjadi pola, bukan insiden tunggal, dan belum ditangani secara sistemik oleh birokrasi pendidikan (Kompas.com, 2024). Dalam perspektif teori Peters (2001), mahasiswa dalam hal ini berperan sebagai aktor paling lemah dalam rantai kekuasaan birokrasi, di mana beban administratif dan ketidaktepatan sistem yang dilimpahkan, tanpa diberikan ruang partisipasi sejati dalam pengambilan keputusan.

Keterlambatan ini tidak hanya merugikan mahasiswa dari segi kepastian administratif, tetapi juga berdampak pada mitra industri. Sejumlah mitra menyatakan belum menerima arahan resmi dari penyelenggara terkait penempatan mahasiswa maupun timeline kegiatan. Hal ini dilaporkan dalam artikel Magelang Ekspres (2024), yang menyebutkan bahwa proses seleksi dan *offering* pernah ditangguhkan tanpa kejelasan waktu lanjutan, sehingga tidak sedikit Mitra mengundurkan diri dari bagian MSIB. Dalam perspektif birokrasi politik, kondisi ini menggambarkan terjadinya friksi antar aktor institusional akibat perbedaan kapasitas, ekspektasi, dan ketergantungan yang tidak seimbang. Mitra industri, yang dalam banyak kasus merupakan entitas non-pemerintah, terpaksa mengikuti mekanisme administratif yang dirancang sepihak oleh

negara, tanpa ruang untuk dialog atau negosiasi. Sebagaimana dicatat oleh Peters (2001), dalam sistem birokrasi modern, relasi antara negara dan aktor non-negara seringkali menunjukkan pola dominasi yang tidak seimbang, sehingga kebijakan publik sulit diimplementasikan secara adaptif di lapangan.



Gambar 5

Sumber: X (<https://x.com/blombarshal/status/1824058728016146503>)



Gambar 6

Sumber: X (<https://x.com/blombarshal/status/1824058728016146503>)

Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai institusi penghubung antara mahasiswa dan mitra industri juga mengalami kebingungan akibat minimnya informasi resmi dari pusat. Banyak perguruan tinggi kesulitan dalam merancang kebijakan internal terkait konversi SKS dan penjadwalan akademik karena tidak adanya kejelasan dari Kemendikbudristek mengenai waktu mulai pelaksanaan program. Ketiadaan informasi ini berimplikasi pada ketidaksiapan perguruan tinggi dalam mengintegrasikan MSIB ke dalam sistem akademik formal, terutama menyangkut pembimbing akademik, penjaminan mutu, dan pelaporan kegiatan mahasiswa.

Dengan berat hati kami infokan bahwa interview yang telah dijadwalkan akan **DIBATALKAN**. Hal ini dikarenakan kuota magang sudah terpenuhi. Mohon maaf kami ucapkan atas ketidaknyamanannya.

Terima kasih.

Gambar 7

Sumber: X (x.com/pewpwe111/status/1824302650801918384?s=46)



Gambar 8

Sumber: X (https://x.com/ayy_ucha/status/1824960423323730214?s=46)

Permasalahan mengenai pemangkasan kuota peserta magang ini menjadi perbincangan di tengah mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam ekosistem MSIB ini. Simpang-siur berita mengenai pemangkasan kuota membuat mereka semakin mempertanyakan profesionalisme Kemendikti dalam menyampaikan informasi. Begitu Di pihak lain, mitra terpaksa memberitahukan kepada mahasiswa yang sudah “diterima” permohonan maaf karena mitra harus mengubah keputusan penerimaannya dikarenakan adanya pemangkasan kuota tersebut. Melalui teori Guy Peters (2001), bisa dilihat bahwa permasalahan terkait pemangkasan kuota dalam program MSIB menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara birokrasi yang hierarkis dan kaku dengan kebutuhan untuk bersikap lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan peserta program dan mitra. Kegagalan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan yang tidak transparan berdampak pada hilangnya kepercayaan dari mahasiswa dan mitra, yang seharusnya dapat dihindari dengan adanya sistem birokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dinamika birokrasi dalam pelaksanaan Program MSIB Batch 7 yang menjadi bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidakefisienan dalam koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam program ini, termasuk Kemendikbudristek, perguruan tinggi, dan mitra industri. Adanya komunikasi yang lambat dan tidak sinkron mengakibatkan keterlambatan dalam pengumuman seleksi dan perubahan linimasa yang menyebabkan keresahan di tengah mahasiswa. Hal ini menimbulkan kritik terhadap transparansi dan profesionalisme pihak penyelenggara yang semestinya memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu.

Melalui pendekatan teori birokrasi politik dari Guy Peters, penelitian ini melihat bahwa birokrasi dalam pelaksanaan program MSIB tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang netral, namun juga merupakan arena interaksi kekuasaan yang penuh dengan ketegangan antar aktor yang terlibat. Sebagai contoh, ketidakselarasan antara kebijakan yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek dengan kesiapan

implementasi di perguruan tinggi dan mitra industri mengarah pada ketidakpastian dan frustrasi yang dirasakan oleh mahasiswa dan mitra. Teori Peters menekankan bahwa birokrasi sering kali dipengaruhi oleh pertarungan kekuasaan dan kepentingan politik, yang membuatnya tidak selalu efisien dalam menjalankan tugas administratif. Dalam kasus MSIB, hal ini tercermin dalam lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa struktur birokrasi MSIB cenderung rigid dan tidak fleksibel, yang menghambat adaptasi terhadap kebutuhan yang berubah-ubah. Sebagai contoh, perubahan mendadak dalam kuota peserta magang dan ketidakpastian dalam timeline menunjukkan betapa birokrasi yang tidak responsif dapat menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai peserta program yang paling terdampak, merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan mengenai seleksi dan penempatan magang, yang seharusnya sudah diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, peran mitra industri dalam program MSIB juga memperlihatkan bagaimana birokrasi yang kaku dan prosedural dapat menjadi hambatan besar. Banyak mitra industri yang kemudian mengubah keputusan karena ketidakpastian mengenai jumlah kuota dan proses seleksi yang belum selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mitra industri adalah pihak eksternal yang memiliki otonomi tertentu, mitra industri tetap terikat pada sistem birokrasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek, di mana tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan praktis dan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh mitra industri. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan antara aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah sehingga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan MSIB tidak disertai dengan sistem komunikasi yang memadai antar lembaga yang terlibat. Proses koordinasi yang lambat dan tidak efektif berkontribusi pada ketidakjelasan informasi, baik untuk mahasiswa maupun mitra industri. Keterlambatan dalam pengumuman seleksi dan pergeseran jadwal yang tidak diinformasikan dengan jelas memicu gelombang kekecewaan yang besar di kalangan mahasiswa, seperti yang tercermin dari keluhan yang

meluas di media sosial. Mahasiswa terpaksa untuk menggunakan tekanan publik melalui "serangan media sosial" untuk mendapatkan respons dari pihak penyelenggara program. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang gagal berfungsi sebagai saluran resmi dan efisien, memaksa peserta untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Oleh karena itu, kegagalan pelaksanaan MSIB Batch 7 tidak disebabkan oleh kelemahan pada desain kebijakan, melainkan merupakan hasil dari birokrasi yang terlalu sentralistik, tidak adaptif, dan terjebak dalam struktur kekuasaan fiskal-politik yang rigid. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang meliputi: (1) desentralisasi kewenangan teknis ke kampus dan LLDikti, (2) sinkronisasi dini antara Kemendikbudristek dan Kemenkeu terkait anggaran program, (3) reformulasi sistem komunikasi publik berbasis digital yang transparan, dan (4) pelibatan mahasiswa serta mitra dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultatif tetap. Hanya dengan membongkar logika birokrasi vertikal yang tertutup dan menggantinya dengan tata kelola yang deliberatif dan kolaboratif, program seperti MSIB dapat menjalankan fungsinya secara utuh sebagai jembatan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja dalam konteks negara demokratis yang sehat dan adaptif..

Daftar Pustaka

- Ali, M., Luthfi, M. K., Mustopa, M., Oiwobo, M. F., & Nasor, M. (2023). Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 2134-2145.
- Aprillia, D. A., & Satriani, A. I. (2025, February). Hubungan Program Mbkm Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dengan Keterampilan Berkomunikasi Dalam Organisasi. In *Bandung Conference Series: Communication Management* (Vol. 5, No. 1, pp. 597-604).
- Devi, I., Sesmiarni, Z., Syafitri, A., Simbolon, A. M. Y., & Iswantir, I. (2023b). Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Guru Di Mtss Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14422-

14433.

Detik.com. (2025, April 17). Cek di sini jadwal lengkap pendaftaran MSIB Batch 7. Detik.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7315753/cek-di-sini-jadwal-lengkap-pendaftaran-msib-batch-7>

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). Buku panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<https://www.kemdikbud.go.id>

Kompas.com. (2024, Juli 20). Alasan Mahasiswa Pertanyakan Mundurnya Pengumuman MSIB Batch 7 atau Magang Merdeka.

<https://www.kompas.com/edu/read/2024/07/20/161400871/alasan-mahasiswa-pertanyakan-mundurnya-pengumuman-msib-batch-7-atau-magang>

Kompas.com. (2024, Juli 31). Kemendikbud Ungkap Alasan Jadwal Magang Merdeka Batch 7 Sempat Tak Ada.

<https://www.kompas.com/edu/read/2024/07/31/154458671/kemendikbud-ungkap-alasan-jadwal-magang-merdeka-batch-7>

Kemdikbud.go.id. (2024, September). MSIB Angkatan 7 Resmi Dimulai.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/09/msib-angkatan-7-resmi-dimulai>

Magelang Ekspres. (2024, Juli 12). Seleksi dan offering MSIB Batch 7 ditangguhkan usai timeline mundur satu bulan, Kemdikbud buka suara. Magelang Ekspres.

<https://magelangekspres.disway.id/read/666913/seleksi-dan-offering-msib-batch-7-ditangguhkan-usai-timeline-mundur-satu-bulan-kemdikbud-buka-suara>

Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peters, B. G. (2001). The politics of bureaucracy (5th ed.). Routledge.

Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. Metode Penelitian Ekonomi Syariah.

X. Ayy Ucha. (2025, April 17). [Tweet]. X.

https://x.com/ayy_ucha/status/1824960423323730214?s=46

X. Blombarshal. (2025, April 17). [Tweet]. X.

- <https://x.com/blombarshal/status/1824058728016146503>
- X. Dinamikkkkkkk. (2025, April 17). [Tweet]. X.
- <https://x.com/dinamikkkkkkk/status/1824945539756196018>
- X. Pewpwe111. (2025, April 17). [Tweet]. X.
- <https://x.com/pewpwe111/status/1824302650801918384?s=46>